

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai, melindungi dan memberikan nikmat sehat serta berbagai kemudahan sehingga Laporan Kegiatan Pembinaan Kepada Partai Politik di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap Panitia Pelaksana, para peserta dan pihak-pihak yang telah mendukung serta berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Laporan Kegiatan Pembinaan Kepada Partai Politik di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 ini, baik dari mulai persiapan hingga pelaksanaan kegiatan.

Semoga apa yang telah dilakukan ini memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan kemajuan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, Juni 2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



Drs. HERMANUS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700313 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Penyelenggaraan	1
C. Tujuan Kegiatan	3
D. Waktu dan Tempat	3
E. Organisasi Penyelenggara	3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	4
A. Bentuk Kegiatan	4
B. Narasumber	4
C. Kepesertaan	4
D. Jadwal Penyelenggaraan	5
E. Resume Kegiatan	6
BAB III PERMASALAHAN DAN SOLUSI PEMECAHAN	22
A. Masalah Yang Dihadapi	22
B. Upaya Yang Dilakukan	22
BAB IV PENUTUP	23
A. Kesimpulan	23
B. Saran	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Surat Keputusan Kepala Badan Tim Pelaksana Kegiatan	
Sambutan Pejabat Pembuka	
Laporan Penyelenggara	
Materi	
Undangan Kegiatan	
Dokumentasi	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konsekuensi kehidupan politik yang kian berkembang akan berpengaruh dalam tatanan kehidupan politik nasional, Partai politik merupakan salah satu pilar kekuatan yang menyangga mekanisme kehidupan demokrasi bangsa kita yang berdasarkan Pancasila. Sehingga dengan demikian, Partai Politik harus mempunyai kemauan politik untuk selalu mawas diri, seraya bertekad bulat menjadikan dirinya sebagai kekuatan dinamis pendukung proses pembangunan politik yang sedang dan terus dilaksanakan. Oleh karena itu, berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur belum cukup untuk menunjang berhasilnya pembangunan politik, melainkan ada faktor sangat utama yaitu partisipasi masyarakat yang masuk dalam demokrasi seperti dalam kehidupan politik yang benar-benar dilandasi oleh kesadarannya tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Karena itu diperlukan adanya Pendidikan politik bagi warga negara, agar memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam rangka memberikan pendidikan politik itulah pemerintah turut memberikan perhatian dengan adanya bantuan yang diberikan kepada Partai Politik dalam rangka memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat.

Sebagai konsekuensi adanya bantuan keuangan kepada parpol tersebut, Partai Politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBN/APBD kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terhadap parpol yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administrative berupa penghentian bantuan keuangan parpol sampai laporan tersebut diaudit oleh BPK.

Dalam upaya pembinaan kepada Partai Politik untuk dapat membuat laporan pertanggungjawaban atas bantuan keuangan yang diterima dari APBD/APBN agar sesuai dengan asas dan ketentuan yang berlaku, maka diseminasi (penyebarluasan informasi)/sosialisasi merupakan Langkah yang terus digalakkan demi terwujudnya tata Kelola pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol yang tertib asas dan tertib administrasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 6. Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 bomor 182);
 7. Undang – undang nomor 9 tahun 2022 tentang provinsi Kalimantan Barat (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 69, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6780);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6177);
 9. Peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat {Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
 13. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2021 Nomor 141).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terlaksananya pembinaan terhadap parpol dalam rangka pengajuan maupun laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol.

2. Tujuan

Meningkatkan pemahaman parpol mengenai bantuan keuangan parpol, terkait mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan asas dan ketentuan yang berlaku.

3. Tema

Melalui Pembinaan Kepada Partai Politik Kita Wujudkan Pertanggungjawaban Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang Akuntabel.

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

a. Waktu Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pembinaan Partai Politik di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 3 Mei 2023.

b. Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pembinaan Partai Politik di Provinsi Kalimantan Barat diselenggarakan di Hotel Mahkota Pontianak.

E. ORGANISASI PENYELENGGARA

Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. BENTUK KEGIATAN

Kegiatan berupa pertemuan dalam rangka pembinaan dan meningkatkan pemahaman Partai Politik dalam mengelola bantuan keuangan Partai Politik sesuai ketentuan yang berlaku, sasaran kegiatan 12 Partai Politik dan Kesbangpol Kabupaten/Kota.

B. NARASUMBER

Narasumber kegiatan Pembinaan Kepada Partai Politik di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

- a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Drs.Hermanus, M.Si dengan materi "Evaluasi Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022"
- b. Lektor/Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak, DR. Jumadi dengan materi "Urgensi Pendidikan Politik bagi Partai Politik dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat";
- c. Direktur Politik Dalam Negeri, Bapak Drs. Syarmadani, M.Si dengan materi "Peran Partai Politik sebagai Mitra Pemerintah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak Tahun 2024";

C. KEPESERTAAN

Adapun peserta dalam kegiatan ini sebanyak 50 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 36 orang serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat sebanyak 14 Orang.

D. JADWAL PENYELENGGARAAN

HARI/TGL/WAKTU	URAIAN	KETERANGAN
Rabu, 9 Mei 2023		Hotel Mahkota
07.30-08.00	Registrasi Peserta	Panitia
08.00-08.30	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan - Menyanyikan lagu Indonesia Raya - Pembacaan Do.a - Laporan Panitia - Sambutan 	Burhan Drs. Hermanus, M.Si Drs.H.Alfian, M.M
08.30-08.45	Coffe Break	
	Pemberian Materi	
08.45-10.45	Direktur Politik Dalam Negeri dengan materi " Peran Partai Politik sebagai mitra Pemerintah untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak Tahun 2024"	Drs.Syarmadani, M.Si
10.45-12.45	Lektor/Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, denganm materi "Urgensi Pendidikan Politik bagi Partai Politik dalam rangka meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat".	DR.Jumadi
12.45-14.45	Kepala Badan Kesbangpol Prov.Kalbar dengan Materi "Evaluasi Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022"	Drs.Hermanus, M.Si
14.45-15.00	Penutupan	

E. RESUME KEGIATAN

Dalam rangka meningkatkan dan menambah wawasan politik bagi Partai Politik di Provinsi Kalimantan Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepada Partai Politik di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2023 bertempat di Hotel Mahkota Pontianak, mengundang Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik di Provinsi Kalimantan Barat yang berjumlah 36 orang, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat yang berjumlah 14 orang. Sehingga total peserta kegiatan ini adalah 50 orang..Tema kegiatan Dialog adalah "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pendidikan Politik".Tujuan kegiatan adalah Meningkatkan pemahaman politik serta masyarakat dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024.

Acara Pembinaan Kepada Partai Politik di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 di buka oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekda Kalimantan Barat Drs. H. Alfian, MM dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Administrator dan Fungsional dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Dalam arahnya Asisten Administrasi dan Umum Sekda Kalimantan Barat menyatakan bahwa Partai Politik memiliki arti penting dan strategis dalam sebuah sistim demokrasi, Partai Politik diyakini sebagai instrumen yang strategis bagi perkembangan demokrasi di suatu negara di masa sekarang dan dimasa yang akan datang. Melalui Partai Politik dipercaya akan membawa perubahan terhadap negara ini, Oleh karena itu Partai Politik harus profesional, demokratis dan akuntabel. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui Pendidikan Politik baik yang ditujukan kepada kader partai maupun kepada masyarakat.

Untuk mendorong Partai Politik melakukan pendidikan politik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka setiap tahun Pemerintah memberikan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Hibah Bantuan Keuangan ini sesuai Pasal 27 ayat (1) Permendagri diatas diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Lebih lanjut disampaikan oleh Alfian, bahwa Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik ini hendaknya digunakan secara proporsional, sesuai ketentuan, tidak ada konflik kepentingan, bebas dari korupsi, sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Perlu mendapat perhatian juga bahwa penggunaan dana bantuan keuangan partai politik ini akan selalu

diawasi dan diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sehingga penggunaannya harus benar benar teratur, tercatat dan riil.

Pembinaan kepada Partai Politik menghadirkan 3 (tiga) Narasumber yang terdiri dari Direktur Politik Dalam Negeri Bapak Drs.Syarmadani, M.Si dengan materi "Peran Partai Politik sebagai Mitra Pemerintah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak Tahun 2024"; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Bapak Drs. Hermanus, M.Si, dengan materi "Evaluasi Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022"; Lektor/Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak, DR.JUMADI dengan materi "Urgensi Pendidikan Politik bagi Partai Politik dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat" Setelah penyampaian materi oleh Narasumber dilanjutkan dengan Dialog dan Diskusi.

Sesi Tanya Jawab : Pertanyaan dari Bapak Hariyanto, SH dari wakil Ketua DPP PKB Kalbar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang terhormat kepada para hadirin para panelis semuanya karena singkat waktunya ya jadi pertama tidak pungkiri kita akui sistem demokrasi kita tiap hari memang secara baik tapi hasil dari output dari apa demokrasi itu justru menghasilkan banyak yang lebih buruk terutama polarisasi yang terjadi dikalangan masyarakat diperparah lagi tumbuhnya bazer-bazer atau bazer Rp atau orang-orang bayaran dari para, mohon maaf oknum politisi atau oknum pejabat sehingga memperparah kondisi politik Indonesia itulah salah satu faktor penyebab mengapa partai politik atau anggota dewan tidak mendapat kepercayaan yang baik di mata masyarakat padahal yang kita tahu seluruh partai politik pada saat ini di Kalimantan Barat sendiri pada saat ada bencana banjir pada saat covid kita juga berperan aktif bahkan hal kecil pembagian takjil aja saya melihat di jalan-jalan parpol ikut berperan tapi tidak dinilai oleh masyarakat sebagai bagian dari citra baik dari sebuah parpol itu penyebabnya adalah bazer-bazer Rp pemilik-pemilik modal yang menghancurkan contoh kecil saja, mohon maaf saya dulu bukan pendukung Pak Tarmizi Pak Gubernur ya tapi pada saat ini kita harus akui ada perubahan baik dari seorang Gubernur tapi Gubernur Tarmizi tidak punya bazer misalnya ya saya ini, ini kita perah saja nama dia tidak muncul secara nasional apa yang merusak demokrasi ini, Pak Direktur dari Kementerian Dalam Negeri, itu bazer Pak bahkan bazer ini terindikasi banyak di kelompok-kelompok kementerian di Jakarta di Partai Politik di Tokoh-tokoh, kepala daerah nah ini yang harus disikapi semua kepada kita semua Partai Politik kementerian dan segala macam, kedua untuk Bapak Jumadi kita akui politik uang itu tidak pernah hilang dari Republik ini, omong kosong gratisan dalam Parpol tapi ada cara yang lebih baik, saya ikutin Pemilu sudah banyak bertahun-tahun kenapa money Politik semakin tumbuh subur di negeri ini endingnya pada pendidikan hukum karena tidak ada caleg tidak ada calon kepala daerah yang terindikasi money politik ditindak secara hukum, takut kepada penguasa takut kepada parpol, ini saya ngomong parpol jika ada sekalipun alat PKB, PKS, PPP kalau

Politik tangkap jangan hanya diselesaikan di Panwas atau administrasi saya harap Kementerian Dalam Negeri

Kepolisian, Kejaksaan tegas dalam hal ini, money politik merusak demokrasi saya percaya 70% di DPR RI itu tidak orang baik karena orang baik tidak duduk tidak punya uang nah ini tanggungjawab kita semua Pak, tanggungjawab Anda, tanggungjawab kesbangpol tanggungjawab kita semua dan rakyat ada kata yang menarik dari rakyat apa enggak ada duit enggak ada suara itu fakta berarti yang merusak demokrasi ini juga rakyat kalau kita pendidikan Politik dilakukan hanya basa basi Pak, itu omong kosong inti dari semua ini endingnya adalah aparat penegak hukum tindak tegas seluruh caleg sebagai contoh saya sambil berguyuban 30 hari sekali-kali lah ada tarawih dapat bagian amplop gambar Partai Politik yang viral tapi tidak dianggap itu pelanggaran apa apaan republik ini itu salah satu contoh Pak ya, jadi ketika para akademisi para panelis mengevaluasi kami, Partai kami terima itu tapi mohon seluruh aparat penegak hukum ini diperhatikan kedua untuk Kesbangpol saya rasa memang tegurlah kami kami lebih enak ditegur daripada ending akhirnya evaluasinya tidak enak dan dari kami ini dari tadi datanya sudah disampaikan lebih banyak ini nanti kami juga evaluasi di Internal Partai kami, tidak ada lebih banyak kepada masyarakat itu saya harapkan hanya dua itu Pak, ini sih bukan saran bukan apa hanya kegelisahan kita semua bahwa kita menginginkan Pemilu ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik demokrasi yang baik tapi kalau hal ini kita tidak diberlakukan tegas maka itu hanya mimpi.

Bapak Antonius Situmorang dari Partai Gerindra

Pertama terima kasih buat narasumber pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal mungkin juga bisa jadi pertanyaan atau paling tidak sekedar bahan diskusi kita bersama saya mengatakan begini Politik di negara kita ini termasuk Politik yang bergegas tinggi kenapa bisa sampai berbudaya tinggi saya pikir kita semua harus bertanggungjawab telah menciptakan sebuah Politik yang berdaya tinggi jangan para pakar mau nyalahkan Parpol aja atau mau menyalahkan Pemerintah karena sebelumnya para pakarlah yang minta supaya Partai Politik memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi menarik itu di 2014 ramai-ramailah orang yang punya duit ini bergabung ke Partai Politik tidak bisa lari Partai Politiknya karena memang diminta harus pasang baleho pendaftaran caleg diberi kesempatan nah sementara yang ada di Partai Politik sendiri dilihat dari kemampuan ndk ada kemampuan dilihat dari finansial ndk ada yang datang bawa tas sementara Partai ini pengen punya dewan sebanyak-banyaknya mulailah datang yang bawa tas nih tadi mulailah dia enggak apa-apa saya nomor terakhir juga ndk apa-apa nantikan pakai suara terbanyak duduk nomor 10 pun duduk jadi dewan luar biasa nah ini sekarang setelah kondisinya seperti yang ada sekarang lalu seolah-olah dosanya ada di Partai Politik, saya sebagai orang Partai pertanyaan dimana tanggungjawab para pakar dimana tanggungjawab pemerintah dimana tanggungjawab Pemilu dimana tanggungjawab penyelenggara pemilu dimana tanggungjawab medsos harus

kita akui sekarang ada kita belum pernah secara bersama-sama secara lebih detail memasukkan masalah medsos ini di Politik padahal ini sekarang bisa jadi dosa besar kalau kita tidakantisipasi dari sekarang masalah saya terkait dengan banyak terus yang terakhir seperti yang bapak sampaikan masalah penegakkan hukum. nah ini harus kita pikirkan bersama-sama kedua inikan memang muncul karena kekecewaan masyarakat terhadap calonnya yang menjadi anggota dewan kenapa karena apa yang menjadi keinginan masyarakat itu tidak terlalu tinggi sehingga anggota dewannya sendiri memang tidak mampu untuk melaksanakannya. jadi harapan masyarakat terhadap anggota dewan yang dia pilih itu terlalu tinggi nah ini juga menjadi permasalahan keluar duit banyak yang punya duit tapi kalau nggak mau keluar juga anak kan jadi gitu kan yang luar biasanya lagi ndak punya duit punya pemikiran seperti itu ada pula yang ngasih duit ini yang luar biasa lagi masih banyak juga yang goblok ya karena saya dari 99 udah menjadi anggota dewan jadi saya sangat mengalami gitu 99 Pak, orang datang ke Partai itu bawa rokok bawa kopi bawa gula ke kita ke kantor 2004 sudah mulai agak sebagian ya masih ada yang datang tapi kalau 99 beras saja di sumbang sama masyarakat ke partai di 2004 sudah mulai goyang -goyang nah sekarang saya mau sampaikan begitu ada Kesbangpol, nyumbang duit masyarakat namanya datang ke Partai minta duit saya harus sampaikan ini bantuan keuangan menurut pakar ini solusi untuk Partai menjadi jauh lebih baik tapi kalau saya mau katakan ini suatu saat nanti bisa-bisa inilah yang membuat Partai menjadi tidak lebih baik saya tidak tahu saya bukan pakar saya tamatan SMA Pak ya tapi bisa kalau dulu semua orang bilang begitu kesempatan semuanya kepada masyarakat untuk maju menjadi Caleg itu akan terjadi demokrasi yang terbaik bapak tahu pernah punya statistik tidak ya masuk penjara korupsi itu lebih dari pada 80% itu bukan pengurus partai asli itu orang yang masuk bergabung ke partai-partainya udah jadi pak lebih 80% saya tidak mempunyai data resminya tetapi silahkan di cek, saya harap yang dari perguruan tinggi coba cek betul atau tidaknya karena saya sangat yakin yang betul-betul orang yang mendirikan dari awal yang memang berupaya membesarkan partai dari yang paling susah tidak akan mudah untuk terlibat korupsi tetapi untuk orang yang tadinya melihat adanya aspirasi setiap saya mau lewat itu yang menjadi pertanyaan mau dibawa kemana ya kedepannya. Dan untuk yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa mudah-mudahan ini salah satu contoh katakanlah : 1 kabupaten mempunyai anggota dewan kurang lebih 40 orang dari 40 orang yang layak menjadi dewan itu hanya sekitar 50% dari 50% yang akan menjadi anggota dewan, yang layak itu hanya 30% yang mau. Silahkan saja berapa yang memang mau bekerja dari 40 orang tersebut, kita katakan 40 hanya 20 orang saja yang layak menjadi anggota dewan kalau terpilih pak tapi apakah layak separuhnya 20 itu hanya sekitar 30% saja yang mau bekerja. Silahkan saja nanti jadi dan saya mohon maaf untuk teman-teman yang bernama Budi dan Fajar kalau saya melihat kata untuk kegiatan politik kita yang paling sederhana ini bisa dibuat dalam satu kalimat Budi dilupakan karena datangnya saudara fajar tersebut Terimakasih.

Bapak Mardianto dari Kesbangpol Kabupaten Sintang

Ini mungkin terkait beberapa sharing yang ingin saya sampaikan, yang pertama itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kaban terkait masalah bantuan keuangan jadi kami di bisa secepatnya dikoordinasikan karena kami sudah beberapa kali ditanyakan oleh para pemimpin parpol yang belum disampaikan ini yang pertama lalu yang kedua terkait inpres tentang optimalisasi jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi penyelenggara pemilu kami beberapa waktu lalu sudah mendapatkan surat dari KPU maupun dari BPJS untuk meminta koordinasi nah setelah kami koordinasikan kepada Bapak Bupati kami akan laksanakan pada hari Jumat, nah dalam invest tersebut diminta pada Bupati untuk dapat memfasilitasi kalau kita memfasilitasi kembali kita pendanaan. Hibah ini tidak mungkin lagi untuk terkait pembayaran BPJS kepesertaan pemilu tersebut nah cuman kemarin kami sudah sampaikan kepada KPU dan Bawaslu untuk mendata bagi siapa saja badan ad hoc baik di tingkat PPK maupun sampai di tingkat Desa nantinya siapa-siapa saja yang akan ikut dalam kepesertaan pemilu tersebut. Jadi kemarin koordinasi awal kami meminta kalau bisa ini dimainkan di tingkat atas agar dapat menyampaikan sehingga membuat suatu penekanan bahwa untuk iuran BPJS tersebut dapat di potong dari honorarium tersebut tetapi kalau di tingkat Kabupaten maupun KPU dan pemerintahan daerah tidak mungkin untuk membuat suatu petunjuk tentang hal tersebut karena kita tidak ingin nanti ada bahasa yang dari luar bahwa ini sudah dipotong oleh KPU.

Tetapi alangkah baiknya ini dari tingkat Kementerian yang mungkin bisa membuat suatu petunjuk terkait hal itu kepada KPU harus terkait iuran itu bisa di anggarkan dari honorarium, yang kedua itu lalu yang ketiga terkait pelaksanaan Pilkada kemarin juga kami sudah disampaikan oleh Bappeda maupun TAPD bahwa besok mereka akan melaksanakan kegiatan satu poin yang akan disampaikan adalah terkait masalah pendanaan pemilu yang kemarin kita sudah memberikan catatan kepada BAPEDA maupun BKAD kami minta untuk finalisasi terkait sharing kita yang akan disahkan oleh Provinsi maupun Kabupaten nah seperti itu ini yang ketiga lalu yang kedua yang keempat ini terkait 40% pak dari Kementerian Maupun dari Kesbbangpol Provinsi terkait kemarin kita diminta tak bulan 5 ini harus sudah posting dari surat Kementerian dalam Negeri bahwa 40% itu sudah bisa dianggarkan di tahun 2023 nah kami salah satu daerah di tingkat kabupaten yang kemungkinan tidak dapat ataupun belum mampu untuk memenuhi 40% tersebut di 2023 kemarin kita sudah koordinasikan juga pada pimpinan daerah nah ini berkenaan dengan pendaftaran bacaleg sesuai dengan webinar terakhir kemarin.

tanggal 17 terkait PP 32 Nomor 18 tentang pengunduran diri bahwa disebutkan ketika ASN ataupun pejabat publik yang mendapatkan pembiayaan dari APBN ataupun PBD itu sudah khususnya untuk update untuk ASN ini sudah harus mundur sebagai ASN status dan kewenangannya sudah lepas ketika ingin menjadi anggota DPR RI Provinsi dan Kabupaten. Jadi, ketika ingin mendaftarkan sebagai caleg berbeda dengan DPD. DPD itu

ditetapkan ketika mereka sudah ditetapkan sebagai calon tetap, baru mundur karena pemberlakuannya undang-undang 7 sedikit berbeda terkait DPR RI maupun DPRD nah di Kabupaten kami ada indikasi beberapa ASN yang mendaftar dan sampai sekarang statusnya masih sebagai ASN seperti itu secara logika jadi ada standar ganda, sekarang sudah pegang KTA dan masih mempunyai NIP juga seperti itu nah kemarin kita sudah jadi agak sedikit apa terkait aturan tersebut tapi kita mengajukan ini ke BKN undang-undang pemilu bahwa ketika ASN ingin berpolitik itu sudah harus Mundur dari ASN kemudian juga sudah ditegaskan oleh Kepala BKN ketika Webinar terakhir kemarin tanggal 17 April kemarin, mungkin ini yang bisa saya sampaikan.

Tanggapan :

Bapak Drs. Syarmadani, M.Si

Untuk tanggapan dan respon dari tiga pertanyaan kita dari pak Riyanto PKB kemudian Antonius Situmorang dari GERINDA dan Pak Mardianto dari Kabupaten Sintang kami persilahkan mungkin yang pertama tadi, luar biasa ini banyak sekali gitu responnya Terimakasih. Saya izin dulu kepada dua narasumber yang lain karena pada banyak hal memang ada keterkaitan dengan pekerjaan kami tadi sebelum ini yang sebelum bicara tentang parpol itu saya juga sangat respon dari semua orang tadi pertama Pak eksistensi Pemilu kita kadang-kadang permainan di dunia maya ini itu juga sangat berpengaruh terkait dengan pengaruh polarisasi akibat hoax kunjungan kebenciannya jadi kadang-kadang hal ini justru lebih mengemuka dibanding adalah dibanding pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dilakukan oleh apa partai politik kader lakukan namun inilah dunia pak, jadi saya kira memang orang seperti itu juga media pers itu kadang-kadang bad news is good new orang lebih suka membicarakan aib dibandingkan hal-hal baik kalau baik dianggap bisa dalam posisi ini yang saya mau apa sampai ke sebagai sebuah diskusi saya kira ini adalah tantangan-tantangan karena faktanya memang masyarakat kita itu.

73,3% Penduduk Indonesia adalah penggunaan internet aktif dan 68,9% penduduk yang aktif tadi menggunakan sosial media yang kadang-kadang merupakan ruang yang para buzzer tadi tapi memang sudah sebuah perilaku kita kalau mohon maaf kita pergi ke kantor atau berganti aktivitas dompet tinggal tidak apa-apa, istri tinggal balik kita itu terlepas password itu karena apa ada ketergantungan kita pada dunia maya dan memang faktanya bahkan sudah menggeser lingkungan hidup tempat lain 8 jam 30 menit kita itu habis untuk apa melaksanakan aktivitas-aktivitas itu tadi bahkan TV pun televisi yang dulu menjadi tontonan wajib itu tinggal ditonton tidak bisa dibuka bisa diperbesar jadi broadcasting televisi itu hanya 2 jam 50 menit 2 jam lebihnya 8 jam 36 menit itu banyak.

Pada kegiatan-kegiatan sosial media ini fakta tapi kita tentu tidak bisa berdiam ini karena memang istilah yang dibangun oleh kominfo itu adalah Pemerintah penegak hukum juga dunia pendidikan semua pihak termasuk pers sendiri bagaimana membangun ini semua secara moral terbangun sebuah karakter kalau agama itu akan ujaran kebencian itu dilarang bohong

tapi dibalik itu semua adalah penegakan hukum juga Cuma disini ada bingungnya keras sedikit dibidang pemerintah represif gitu kan dilepas kebablasan nah bagaimana sekarang kita mampu membangun sebuah sanksi sosial adalah ketika kita tidak memberikan lapangan pekerjaan pada buzzer ini tadi pekerjaan yang sulit memang bagaimana jadi jangan pernah respon hal-hal yang memancing adu domba karena apa kadang-kadang kita lihat akunnya itu akun robot namanya tidak pernah jelas kalau nama jelas biasanya kan. Karmadani atau Muhammad ataupun Antonius itu orang misalnya sudah jelas bertanggung jawab dari cara bicaranya tapi kalau dengan itu cinta NKRI, kadang-kadang dia mau bebas menyatakan pendapat tidak mau dihukum nah tapi karena memang berdasarkan itu terus kebanyakan adalah akun robot kadang-kadang kita suka nonton di TV atau di media satu orang menguasai mungkin 50 HP dia yang berantem sama dia berantem karena dia dapat duit dari situ ada cara mengukurnya sehingga bahkan salah satu desa diluar negeri tapi itu hidup dengan cara seperti ini nah sebagian kita mulai bapak bilang tadi buzzer sanksinya apa, mari kita saksi jangan pernah dikomen kalau tidak komen itu tidak naik itu rating dia dan dia tidak akan dibayar karena dianggap gagal. Nah selain itu tentu saja basis moral pendidikan kita bangun sehingga makin bijak misalnya kan cek dulu kebenaran kedua walaupun benar bermanfaat atau tidak hal-hal seperti ini tidak bisa makan langsung kenyang tetapi proses makannya pembangunan karakter tadi perlu kita bangun antara lain juga aktif di dunia maya ini kalau yang kami sering bicarakan memang tidaklah gampang. Kita bangun narasi positif dan mereka tidak dengan merespon tetapi apa yang mereka bangun misalnya money politik kita tidak bangun isu politik lagi apa mereka bicara menipu politik hari ini kita bicara prestasi olahraga yaitu tertutup media itu yang kita coba bangun Cuma sekali lagi memang tidak gampang kami berkoordinasi dengan kominfo berkomunikasi dengan tokoh-tokoh di MUI di Muhammadiyah Partai Politik karena memang karakter orang kita kadang-kadang lebih suka merespons seperti itu *Bad New* tapi ya sekali lagi kedewasaan kita ini juga seperti negara lain karena fakta Amerika yang katanya sudah canggih teknologi pun masih jebol bahkan isunya facebook itu menguasai informasi dari dunia maya bernilai duit untuk ini kami kira bapak ibu juga sangat menyadari bahkan sudah disuarakan tadi saya mohon maaf ya pak yanto jadi kita akan coba pak coba sama-sama keroyok jangan pernah diberi ruang panggung-panggung orang yang seperti itu, kemudian yang kedua terkait dengan money politik ini juga dibicarakan kemarin khususnya ruang gandum ini kan Pidana Pemilu juga sebetulnya faktanya memang masalah di sisi aturan kita ada kondisi keterkaitan orang yang melaporkan yang menerima itu juga dihukum saya nerima akan kena sanksi juga jadi takut dia diam ketika sidang di Pengadilan tidak ada bukti hilang padahal dalam peradilan itu kan sudah gabung itu harusnya ada yang telapor ada saksi ada bukti. Nah yang masalahnya yang pelaporannya penerima ikut dihukum.

Salah satu kesepakatan semua pihak pasca Pemilu ini undang-undang Pemilu kita perbaiki masih banyak hal yang kurang baik tentu kita sama-sama

baik dari penggiat Pemilu dari segi Akademisi dari Partai Politik termasuk juga kawan-kawan yang mungkin menjadi praktis ini melakukan menerima perlakuan yang kurang pas di senayan itu khususnya di komisi dua itu penyelenggara Pemilu itu juga terkadang hancur dikarenakan praktek dilapangan terkadang tidak bisa ditangani tetapi disisi lain penyelenggara Pemilu juga terbatas dengan peraturan namun karena Pemilu juga sudah semakin dekat, kita akan tentu tidak bisa berbisnis terlalu banyak tentang aturan.

Pak Haryanto, kita segera sama-sama kalau memang belum bisa sanksi hukum berikan sanksi sosial tetapi memang tidaklah gampang karena para pelaku ini justru memang lebih suka dengan cara instan, jadi belum bisa sanksi hukum akan kita coba dorong karena banyak pemantau dan pengawas terus. Saya tidak ada kesalahan saja yang menyampaikan tadi untuk dari berbagai macam pilihan, inilah kesulitan karena peraturan perundang-undangan kita adalah kesepakatan dan tidak pernah mempunyai titik ekstrim tidak ada ibaratnya obat buat semua penyakit ditekan ini muncul ini dan ibaratkan balon jadinya akan dipikirkan yang terbaik apakah proposional tertutup atau terbuka ini kadang-kadang seperti ekstrem termasuk yang sedang ada di MK itu kan kami juga termasuk pihak yang tergugat untuk ini sebagai apa pemerintah dan DPR menyusun undang-undang tawaran ini memang ada berbagai hal termasuk sebelumnya pemerintah melakukan apa sebelum undang-undang.

700 ini menawarkan adalah sistem proposional terbuka terbatas, jadi mencoba mengkombinasikan antar tertutup dan terbuka tapi sekali lagi sistem kalau ditambah diperbaiki dengan karakter itu tidak dengar dulu kan waktu awal reformasi ada pertanyaan perbaikan perilaku normal atautkah sistem antara telur ayam mana duluan mestinya ini sering sejarah sistem kita perbaikan karakter juga kita perbaikan kami termasuk yang masih percaya pak dengan pendidikan dengan pemberian sanksi dengan kampanye itu bisa menekan minimal menahan lajun kerusakannya jadi seiring yang bapak bilang tadi kita perbaikan sistemnya terus kita juga ya mohon maaf moral-moral ini melalui pendidikan melalui toko-tokoh keagamaan melalui pendidikan dan tokoh-tokoh keagamaan melalui segala hal yang bisa kita tata bersama karena memang satu yang berjalan sendiri tanpa kolaborasi yang baik saya kira akan sangat ketinggalan kita selalu kalah langkah, jadi penegakan hukum harus dilakukan secara khusus sepakat sekali dengan Bapak sampaikan itu mudah-mudahan kedepannya para Kader Parpol ini atau orang-orangnya yang berniat akan tidaak lagi terbebani oleh publik.

Terkadang hukum ini akan juga tidak bisa saling menyalahkan masyarakat Parpol Pemerintah DPR Penegak Hukum itu semua sudah menjadi tanggung jawab bersama sehingga bersama memperbaiki tokoh-tokoh tertentu baik dimasjid maupun digereja, segala macam pura yang bisa membangun itu semua karena memang faktanya orang masih takut untuk kalah ketika ada satu saja yang muncul.

BPK surat resmi saya ingatkan jangan lama lama makanya triwulan

pertama itu sudah cair uang itu dan surat bisnis itu sudah kita layangkan juga kepada BPK tapi mungkin saya tidak tahu itu informasi ini tidak terlalu sampai dari BPK pusat ke BPK provinsi atau yang menangani Kabupaten Kota nanti saya coba bantu komunikasi dengan harapan yang disusulkan tadi bisa cepat pak Mardianto, karena mereka Lembaga Negara sendiri lagi sejajar dengan Presiden begitu kita interpresif Cuma komunikasi bisa bahkan mereka yang tidak tahu bagaimana kawan-kawan di fasilitasi faktor politik itu bekerja baik-baik ternyata mereka baik dan ada masalah apa kami kumpulkan dari parpol pengelola keuangan hadir BPK hadir masalah ini itu perbaiki atau lagi masih ini sehingga apa percepatan itu juga senang apa ya sudah 95%. jadi misalnya inovasi dan kreatifitas kita percepatan penyalur ini mewakili kemandagri untuk ikut lomba antar lembaga untuk pelayanan prima jadi benar-benar kerja kolaborasi karena faktanya bertahun-tahun ini belum berhasil.

Parpol juga bisa bantu dorong BPK lengkapi semoga cepat penyalurannya di 2023 dan seterusnya untuk masalah iuran jamsos penyelenggaraan ad hoc kaitannya dengan Pilkada karena pemilu sumbernya APBN misal APBN itu Menteri Keuangan bersama KPU sudah sepakat dan dia sudah informasikan ke saya KPU motivasinya adalah memberikan jaminan bagi penyelenggara Pemilu agar juga lebih tenang strateginya dengan istilah itu santunnya ini karena disitulah kalkulasi keuangan negara yang tidak terlalu bagus termasuk daerah. Dia harus dikeluarkan dengan iuran jauh lebih besar uangnya tetapi kalau santunannya kita bisa jaga dan jangan terlalu banyak mati dan sakit sehingga apa yang keluar khas daerah tidak terlalu banyak yang sakit sehingga apa yang sudah keluar dari khas daerah nanti dibicarakan disini, jadi untuk Dirjen Keuangan Daerah sudah siapkan surat edaran dan proses tanda tangan Pak Menteri dan mudah-mudahan nanti setelah itu kita bisa untuk masalah iuran dari APBD nah kami juga mencoba cara terbaik supaya ini tidak menjadi tekanan tertentu apalagi jika ini dikaitkan dengan NPHD ini kan sudah jauh sejak tahun 2020 prinsip bahwa untuk Pilkada, karena ini hajat daerah Zim APBD padas pelaksanaannya nanti keuangannya ada prinsip itu mau yang menyicil tapi yang penting ada pilihannya ada tinggal sekarang negosasinya pada besarannya.

Bagaimana cara supaya benar-benar efisien uang karena kita sama tahu permintaannya besar sementara APBD kita kecil rasionalisasi lakukan apa saja yang diklarifikasi bersama terutama dengan penjara keuangan daerah pengalaman di kemudian MOPHD itu saya tidak ada tinggal, bagaimana nanti mencocokkan terus baca lagi kaitannya bersumber dari APBN atau APBD Keuangan Negara memang kemarin waktu penyusunan PKPU itu sangat berat dan saya kira nanti akan ada pengaturan lebih detail penjelasannya lebih kecil rasionalisasi lakukan klarifikasi bersama terutama dengan penjara keuangan daerah pengalaman di kemudia MPHD itu juga tinggal bagaimana mencocokkan kemudian dikaitannya bersumber dari APBN atau APBD Keuangan Negara memang kemarin eaktu menyusun PKPU itu sangat berat dan saya kira nanti akan ada pengaturan lebih detail penjelasannya intinya bahwa 3 Oktober itu batas terakhir, tetapi ketika

seseorang sudah mempunyai KTA dan ini mesti dia langsung mundur dan pejabat yang berwenang atau apa itu segera memproses berhenti karena itu surat yang tidak bisa ditarik kembali seperti itu dan ada undang-undang juga seperti itu jadi misalnya saya nih mau maju sudah memajukan mundur itu tidak bisa ditarik lagi sudah harus diproses karena terjadinya kekhawatiran pengguna fasilitas Negara. Istilahnya kan masa ada yang bertanding sepeda dan ada yang bertanding mobil dinas, jika tinggal Oktober batas terakhir kalau bisa proses sekarang besar hati melepaskan itu semua dan sudah tahu konsekuensinya.

Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Jumadi :

Makasih sebelumnya saya ingin menegaskan yang dari Sintang saja kalau ada ASN yang dikemudian sudah memiliki KTA laporkan ke KSM sumisinya langsung otomatis sudah jelas undang-undang mengatakan mesin Netral tidak boleh masuk dalam Parpol, jadi kalau ASN yang sekarang memiliki kartu tanda anggota Parpol, kemudian laporkan saja otomatis dia harus mundur ketentuan undang-undang kemudian KPU juga harus tegas dan tidak boleh standar. Tolong parpol juga yang bagian ASN yang sudah memiliki KTA itu dilaporkan juga pak Harianto kita ini hidup hampir disebut dengan era demokrasi digital digital difaktor-faktor kemampuan dunia maya dalam mempengaruhi perilaku politik itu sangat menentukan disinilah letak dimana bazar itu bermain itu sesungguhnya positif jika bakar bazar itu kan muncul didunia usaha sebenarnya tapi dibawa ke dunia politik menjadi persoalan-persoalan krusial kalau banjir itu dibangun dengan cara yang positif sebenarnya bagian dari bentuk promosi Parpol tapi ketika banjir dijadikan sebagai bagian dari Propaganda politik maka yang muncul adalah terminologi propaganda politik maka yang 1000 menjadi sebuah kebenaran itu tim yang muncul dalam perbedaan itu kesalahan di kali 1000 menjadi sebuah kebenaran jadi sesuatu yang tidak benar disampaikan dengan berulang kali itu awal propaganda ya ketika teknologi informasi belum maju kalau sekarang satu orang tekan kalaun ada grub wa 200 orang itu menyebarkan lagi udah itu yang muncul jadi dunia banyak sekarang jadi memang ini harus menjadi musuh bersama menjadi tidak boleh dibiarkan karena rusak demokrasi oleh karena itu yang terpenting menurut saya adalah tadi pak dierut apa nama direktur sudah menyampaikan kita ini pengguna internet terbesar di kawasan asia pengguna tapi bertolak belakang dengan literasi sosial media kita tidak benar itu disampaikan. Nah itulah menjadi tantangan kita oleh karena itu menurut saya setuju dengan sering menyerang sudah muncul tapi saya pak direktur sedikit berbeda dibandingkan dengan 2019 yang lalu ada tensi yang begitu rendah masyarakat untuk merespon itu kalau setelah di media sosial tidak signifikan apakah ini belum masuk para tahapan saya tidak mengerti tapi mudah-mudahan tensi ini tdk terjadi dan tantangan kita bersama ya semua elemen yang ada di sini untuk kemudian meenedukasi agar masyarakat itu memiliki literasi sosial media yang tidak jadi penting tanggung

jawab kita bersama agar partai politik juga punya bagian juga ya ini kan namanya kompetisi Politik ini niat untuk melakukan kecurangan itu sudah ada sebelum masuk kepada kompetisi bola kemudian tolong saya bantu nanti saya bantu tapi kalau dalam kompetisi politik hukumnya begitu.

Niat untuk melakukan kecurangan itu sudah ada sebelum pertandingan terjadi, itulah strategi politik. Oleh karena itulah penting menurut saya terkait dengan menjadikan Buzzer itu sebagai musuh bersama terkait dengan politik uang ini sampai kalau bilang sampai kiamat pun tidak akan sampai, kiamat juga berubah fenomenanya yang akan terjadi seperti Goodbye Money Politik.

ada 3 faktor yang menyebabkan money politik itu masih pertama soal kemiskinan jadi selama situasi sosial ekonomi masyarakat kita masih belum begitu baik ketika tawaran-tawaran masih ada dikalangan elit politik maka jangan salahkan masyarakat, karena masyarakat kita ini masyarakat yang feodalisme patriotis mengikuti apa yang diucapkan atas budaya kita. begitu juga yang kedua adalah faktor penegakan hukum yang lemah hampir dalam setiap pemilu minim orang yang melakukan money politik itu ditindak karena memang undang-undang mengatur terkait dengan alat bukti terkait dengan orang yang melakukan politik itu jadi undang-undang juga mesti saya perlu didefinisikan dan sayang ingatkan bapak/ibu sekalian, bukan propagatif saya 15 tahun ini terlibat dalam rekruimen penyelenggara pemilu, saya ingatkan dengan bantuan parpol untuk mengawal para penyelenggara kalau sudah ada intervensi parpol dalam merekrutmen penyelenggara bapak semisalnya bagaimana netralitas penyelenggara jadi saran saya tolong penyelenggara pemilu baik itu dibawah maupun di KPU kita harus kawal pihak penyelenggara ikut terlibat mengintervensi agar pemilu ini tidak akan rusak. Oleyh karena itulah kawal hasil ini boleh dibiarkan karena ini menyangkut hak bapak/ibu sekalian kalau sudah partai politik terlibat dalam proses seleksi para penyelenggara itu dibentuk adalah sebagai wasit demokrasi kalau udah penyelenggara main di kaki parpol tertentu rusak, maka dari itu saya ingin mengingatkan agar mengawal penyelengagara tapi kita juga mesti mengawal oleh karena itu menurut saya memang penting ya bagi kita untuk pengawalan, oleh karena itulah yang kedua money politik itu kenapa faktor penegakan hukum memang sangat penting ya bagi kita.

Oleh karena itu yang kedua money politik itu kenapa faktor penegakan hukum yang anggap lemah padahal ketika saya memberikan FGD pendidikan di politik di tingkat bawah saya tanya tanya ke Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa money politik apa hukumnya sesuatu yang haram boleh atau tidak kenapa pada politik itu dianggap hal yang biasa nah ini penting menurut saya jadi menurut saya saya tidak terlalu banyak menyalahkan masyarakat kita tanggung jawab kita kalau kita tidak partai politik memberikan pemahaman terhadap semua dari berani enggak kita bersepakat kita turun ke bawah mesti ngumpulkan orang karena orang ada cost kita harus siapkan baju siap kita harus siapkan transportasi sehingga kita harus siap konsumsi konsumsi itu kewajiban cost politik maka beda antara cost politik dengan money politik, kalau tidak ada moral politik dia tipis seperti kulit

ari ya tipis antara manajemen politik dengan cost politik saya singkat aja ini soal tanggung jawab proses rekrutmen menurut saya jadi partai politik juga mesti selektif untuk melakukan proses seleksi terhadap kader partai maupun tadi di awal sudah saya katakan kalau pertimbangannya hanya sekedar misalnya modal ya tidak melihat aspek lain dari kepentingan partai itu yang berbahaya ya jadi ini juga merusak proses di partai politik jadi menurut saya memang proses seleksi di partai.

Politik menjadi penting ya jadi partai politik juga penting untuk melakukan ya edukasi ya ini terkait dengan soal tidak diperbolehkannya melakukan money politik nah kemudian juga menurut saya adalah pengawasan partisipatif mendorong agar masyarakat tidak hanya sedang memilih tapi juga sebagai pengawas ini yang dilakukan oleh Bawaslu kenapa pengemasan partisipatif ya jadi karena itu menurut saya memang ini bentuk tanggung jawab kalau persoalan misalnya tadi ada sedikit menyinggung soalnya pilihan antara sistem terbuka tertutup itu sebenarnya diawali di awal reformasi perangkat dari pengalaman orde baru kita kan menggunakan model proporsional murni tertutup partai politik punya otoritas untuk menentukan dengan tidak suara terbanyak pengalaman dari orde baru yang memunculkan istilah membeli kucing dalam karung itu kita perbaiki sehingga orang menjadi tawarkan sebagai caleg itu orang-orang yang betul-betul dikenal ya memiliki track record masa pakai hakim politik tertentu maka munculah ide perangkat dari sistem pemilu di negara-negara maju dengan menggunakan sistem listrik murni digabungkan dengan sistem personal suara terbanyak oleh karena itu tadi betul kata direktur kita ini sebenarnya belum menemukan sistem yang ideal kalau kita mau ngomong nih sistem kepartaian kenapa menggabungkan antara sistem presidensial dengan sistem multipartai yang banyak diterapkan di amerika latin ini undang-undang Pemilu kita ini ditutup partai kita tuh menerapkan itu sistem presidensial digabungkan dengan multi partai ada hal yang rancu ya ada yang rancu sistem pemilu kita pun juga masih belum menemukan titik yang ideal sebenarnya ini dialog oleh karena itu tawaran PDIP yang masuk ke MK sekarang ini buah dari masih belum menentukannya belum menemukan titik ideal karena ketika berapa tahun sejak tahun tahun berapa kita menggunakan sistem tahun 1999 itu dengan sistem proporsional suara terbanyak itu dampaknya kita rasakan sekarang siapa yang memiliki modal banyak walaupun memiliki elektabilitas tinggi dapat masuk sedangkan orang yang bermodal kecil memiliki elektabilitas masuk dalam kompetisi politik lewat dengan orang yang tidak ada kategori. Bagaimana kita memperbaiki banyak ini keluhan-keluhan oleh karena itu sebenarnya tawaran yang dilakukan oleh PDIP itu ada yang rasional barangkali karena kita ini belum ideal cari yang ideal tidak hanya dengan proporsional tertutup tapi juga diperlukan mekanisme yang memungkinkan publik itu untuk bisa memberikan penilaian terhadap calon yang mereka pilih seperti itu. Menurut saya jadi ini paling tidak mengurangi mengurangi money politik oleh karena itu tidak heran ada beberapa partai-partai yang menawarkan yuk daftar pertimbangannya adalah ini jadi kalau pintar pun

kalau berita ada tidak atau dipandang untuk pendaftaran di calon legislatif jadi penting karena ini dapat cost ndak bisa terbantali karena saya setuju cot politik juga penting itu penting enggak mungkin jadi caleg tuh ndak mengeluarkan duit mesti ada modal di semua negara begitu nah tapi itu yang menjadi persoalan kita bukan cost politiknya tapi money politiknya.

Drs. Hermanus, M.Si

Terimakasih bapak ibu sekalian, dari ketiga penanya ini saya pikir sudah banyak tadi di tanggapi oleh rekan-rekan narasumber nah beberapa hal mungkin yang juga ingin saya tanggapi berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta sekalian kalau kaitan bagaimana upaya kita bersama untuk menghilangkan money politik, saya pikir sudah jelas ya kita sepakat money politik ini yang memang harus betul- betul menjadi perhatian kita bersama paling tidak kita berupaya kita bisa mengelilingi berkenaan dengan maraknya yang terjadi di politik ini saya sepakat dengan pak Jumadi kalau bicara cost politik saya pikir ya tidak ada kegiatan yang tidak memerlukan biaya tapi kalau sudah bicara money politik yang memang ini sebuah fakta yang memang sudah terjadi di mana-mana sehingga memang memerlukan peran serta kita semua tidak hanya pemerintah dan penyelenggara tapi juga menjadi tugas setiap partai politik untuk bagaimana menghindari ini nah cara menghindarkan ini saya pikir juga ya sekali lagi bahkan menurut saya.

Peran partai politik juga sangat strategis terutama pada saat bagaimana mencari dan menyaring para calon-calon tadi tentu di sinilah sangat penting untuk bagaimana membangun kriteria-kriteria artinya calon-calon yang akan direkrut ini ya jangan hanya didasarkan kepada mereka mereka orang yang mampu saja tapi bentuk-bentuk di seleksi bagaimana integritas mereka hati ketika ini sudah dilakukan seleksi terhadap mereka paling tidak ini sudah merupakan modal awal untuk bagaimana kita menghindarkan ya praktik-praktek mana politik seperti itu, kebanyakan biasanya mereka yang akan menggunakan cara-cara money politik ini berdasarkan pengalaman mereka yang memang punya ambisi yang besar untuk menang tapi tidak memiliki popularitas sehingga ingin memaksakan diri untuk bisa menang dan menggunakan lah cara-cara seperti itu itu kan cara-cara instan yang dilakukan tapi kalau mereka yang memang sudah berbuat bapak ibu saya pikir tidak terlalu sulit bagi partai politik untuk bisa menjanging dan menyaring orang-orang yang memang sudah memiliki rekam jejak, memiliki pengalaman yang memang sudah teruji ya banyak berbuat untuk masyarakat. biasanya mereka-mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kasus yang besar, peluang yang besar untuk bisa dipilih tapi kalau mencari orang-orang yang hanya mohon maaf berdasarkan kepada isi tas saja pemilik pemilik modal nah ini yang sangat rentan sekali ketika memaksakan diri mereka-mereka ini yang tidak memiliki popularitas kecenderungan mereka akan menggunakan media politik juga besar jadi itu, kemudian yang berikutnya juga dari bapak dari PKB tadi ya bagaimana nanti tes kemampuan juga volume mengingatkan Penyelenggara yang baik itu KPU Bawaslu dalam

penegakan sanksi dan sebagainya sehingga dan juga peran masyarakat ketika misalnya ya menemukan mengetahui mungkin ada praktek-praktek mana politik seperti itu masyarakat juga artinya memiliki peran untuk menyampaikan laporan tentu laporan ini yang memang terkadang juga yang banyak yang belum dipahami oleh masyarakat ketika menyampaikan laporan terkadang juga tidak disertai dengan bukti ya bukti- bukti Ini juga memang harus hatinya bisa disampaikan karena kalau laporan tanpa didukung dengan bukti ya juga pada akhirnya sangat lemah dalam proses penegakan hukum kedepannya Saya pernah bicara masalah ini juga dengan anggota Bawaslu nah kebanyakan juga ya seperti itu laporan- laporan itu tidak didukung dengan bukti sehingga peran masyarakat sekali lagi sangat besar dan tugas kita bersama partai politik juga untuk bagaimana memberikan pemahaman pada masyarakat tidak hanya aktif dalam menggunakan hak pilihnya tapi juga aktif dalam melaksanakan pengawasan terhadap berbagai misalnya temuan-temuan pelanggaran yang terjadi nah kemudian disebutkan juga bahwa harapan masyarakat terlalu tinggi ya sehingga tidak mampu diwujudkan oleh anggota DPRD Nah kalau harapan · masyarakat tinggi ya wajah-wajar saja Saya pikir kan Yang penting bagaimana para calon-calon itu jangan terlalu banyak memberikan iming-iming ya jangan terlalu banyak memberikan janji-janji yang memang di luar kemampuan kita pak apalagi menjadi anggota dewan bukan dalam arti segala-galanya kepala daerah saja ya kewenangannya juga terbatas karena kalau bicara kewenangannya ada kewenangan kabupaten kota ada kewenangan provinsi ada kewenangan pusat sehingga para caleg-caleg juga artinya harus foto-foto memahami sejauh mana dia mampu berbuat ya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki jadi jangan memberikan janji-janji yang memang pada akhirnya ya menjadi boomerang bagi diri sendiri sehingga ketika itu sudah diucapkan masyarakat pasti akan ingat menagih janji-janji yang diucapkan oleh para calon-calon saya pikir perlu menjadi perhatiannya kita bersama lah bagaimana menyampaikan janji-janji yang memang lebih baik sebenarnya bagaimana menawarkan konsep-konsep ide- ide gagasan yang realistis yang mampu untuk diwujudkan, kemudian yang berikutnya ya berdasarkan fakta banyak anggota-anggota dewan itu bapak katakan mungkin 50% anggota-anggota dewan itu tidak baiknya atau dalam hati yang mau bekerja itu paling 50% saja dari keseluruhan jumlah anggota dewan bisa ya bisa tidak lah mungkin di masing-masing kabupaten bervariasi tapi yang jelas saya juga pernah bertugas sebagai wakil kepala daerah kita melihat ini ajalah pada sidang paripurna karena saya paling sering kadang-kadang hadir pada sidang paripurna dia mengundang kita jam 10.00 sudah hadir jam 12.00 kadang-kadang kita tunggu sampai jam 12.00 sebenarnya kalau mau jujur banyak sudah sidang paripurna itu tidak quorum sebenarnya karena didasarkan kehadiran itu hanya berdasarkan kepada tanda tangan jadi kalau didasarkan kepada betul-betul fisik orangnya banyak sidang-sidang yang tidak bisa dilaksanakan artinya praktek-praktek itu yang dia lakukan bagaimana kita ke depan tentu kita sepakat untuk bagaimana membuat ya demokrasi kitanya

lebih baik bagaimana calon-calon anggota legislatif ke depan juga orang-orang yang memiliki integritas yang baik kapabilitas yang baik sehingga ketika mereka terpilih ya diharapkan bentuk-bentuk memahami amanah yang diberikan tugas kita bersama nih untuk memperbaiki memang banyak persoalan-persoalan yang harus kita perbaiki ya bagaimana ya keaktifan anggota-anggota dewan kita ini ya betul-betul lebih di tingkatkan. Kemudian yang berikutnya dari Kesbangpol sintang berkenan dengan Lhp jadi ya kita memang sepakat bagaimana pengeluaran itu sudah di audit oleh BPK nah baru-baru ini kami juga sudah menerima surat dari Mendagri intinya bagaimana mempercepat penyaluran kita sudah terima itu dan ada di situ juga Sebutkan supaya kita perlu aktif berkoordinasi dengan BPK hanya saja saya lihat mungkin surat ini juga tidak disampaikan tembusan kepada BPK kalau yang disampaikan kepada kepala daerah itu mungkin ya bisa saja ini tidak disampaikan tembusan sehingga kita tidak Satu Frekuensi ini kan kita diminta melakukan percepatan sementara BPK ini mohon maaf kan tadi sudah kita sampaikan datanya bagaimana penyampaian LHP itu ya hanya 4 partai saja tadi yang agak terlambat tapi itu pun terlambatnya juga tidak terlalu lama sampai dengan saat ini bahkan saya hampir setiap hari meminta kepada Kepala Bidang. coba cek dengan BPK koordinasi apakah yang LHP ini sudah selesai atau tidak sampai dengan saat ini belum alasannya sedang proses penggandaan proses penyusunan laporan dan spesifikasi ini juga menjadi kendala kami sehingga kami belum bisa melakukan pencairan arahan Bapak Gubernur, sementara kami diminta bulan Februari itu sudah cair tapi ya mau boleh buat kami tidak bisa ya kan melangkahi karena kami tidak bisa mengintervensi BPK koordinasi sudah kami lakukan.

Terus ini ya tapi sampai dengan saat ini ya belum ada informasi bahwa LHP itu sudah selesai, kalau selesai hari ini mungkin besok sudah kami proses untuk penandatanganan berita acara dari tim verifikasi mungkin dalam waktu dekat juga sudah bisa kami segera proses secara lebih lanjut sehingga saran kami juga mungkin kepada Kemendagri dalam rangka mempercepat ini kalau untuk sarapan kepada daerah mungkin juga kami terbatas mungkin Kemendagri nanti juga bisa berkoordinasi dengan BPK bagaimana percepatannya perlu dilakukan mungkin perlu menjadi masukkan dan kajian kita bersama sehingga kalau ini bisa artinya ke depan BPK bisa kita ajak ya untuk melakukan percepatan percepatan tentu akan lebih baik itu kemudian berkenaan dengan Inpres BPJS ya artinya ya Inpres ini masih akan nantinya akan ada tidak lanjut nanti surat edaran lebih lanjut saya sudah tanya dengan kepala bidang memang juga belum dialokasikan ya anggaran untuk asuransi tidak tahu apakah nanti ini akan menjadi sebuah usulan tambahan karena kemarin juga sudah ada ukuran tambahan dari KPU berkenaan dengan apa honorarium untuk penyelenggara pemilu penyelenggara Pilkada yang sejuk yang sebelumnya mungkin ya kisaran di angka 1 juta lah ya tapi setelah itu kemudian ada standar-standar yang harus kita sesuaikan lagi itu aja yang kemarin untuk ketika profesi nah kemudian berkenan dengan surat edaran dari Kemendagri untuk bagaimana mengalokasikan Pilkada 40% di tahun

2023 ini dan sisa 60% 2024 kami juga masih memikirkan ini karena ya surat edaran juga baru diterima pada tahun berjalan surat edaran ini kan awal-awal 2023 sehingga ya mohon maaf itu sudah disampaikan nah di Tahun 2022 sebelum APBD sebelum APBD ditetapkan ya atau persamaan mungkin dengan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2023 nah ketika ini dibuat pada tahun berjalan di awal- awal tahun 2003 tentu APBN tetapkan sangat berat bagi daerah jangkakan Kabupaten, di provinsi juga belum mampu untuk melakukan 40% ini sehingga ya boleh buat mungkin tetap ini dicairkan dulu ya setelah itu kami sudah sampaikan juga kepada bapak Sekda mungkin nanti akan ada mungkin ya saya katakan tergantung pada kemampuan daerah lagi akan disesuaikan walaupun mungkin belum mampu mencapai 40% tapi paling tidak ada upaya nanti untuk mendekati paling tidak di APBD perubahan sehingga NPHD juga kemungkinan akan kita sesuaikan mereka sebenarnya sudah memiliki dan kesadaran tanggung jawab mereka untuk sebenarnya tidak boleh lagi menggunakan fasilitas kendaraan dan sebagainya tapi ya kadang-kadang memang tidak mudah seperti itu mereka maunya semua ya apa yang masih bisa dimanfaatkan dimanfaatkan semua kecenderungan seperti itu bahkan kadang-kadang ada yang sudah pensiun kendaraan dinas pun juga masih dipakai ya betul kan Nah ini kembali lagi kepada tanggung jawab moral kitalah jadi kalau memang mau pilihan yang maju sebagai caleg ya semestinya sudah harus menyiapkan diri tidak hanya sebatas di atas kertas saja pernyataan tapi juga fasilitas-fasilitas kendaraan atau mungkin ada yang menempati rumah dinas ini sudah harus ya kan di apa disampaikan kembali kepada pemerintah daerah itu yang dapat kami tanggap dari pertanyaan- pertanyaan yang disampaikan dari bapak ibu sekalian terima kasih.

BAB III

PERMASALAHAN DAN SOLUSI PEMECAHAN

A. MASALAH YANG DIHADAPI

Pada setiap Kegiatan Pembinaan Kepada Partai Politik yang hadir sebagian besar bukan pengurus inti Partai Politik yang dapat mengambil keputusan, lebih banyak diwakilkan kepada staf administrasi pada sekretariat Partai Politik.

B. UPAYA YANG DILAKUKAN

Menghimbau Partai Politik agar dalam kegiatan tersebut dapat menghadirkan pengurus inti Partai Politik/pengurus harian.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilu.

Perlu dilakukan upaya untuk mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran parpol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tuntutan mewujudkan parpol sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern. Upaya tersebut antara lain dapat ditempuh melalui pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan Partisipasi Politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perlu diupayakan perubahan untuk memperkuat lembaga perwakilan rakyat melalui langkah mewujudkan sistem multipartai sederhana yang selanjutnya akan menguatkan pula sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Saran

- Pemerintah daerah diminta untuk mendorong Partai Politik agar tepat pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Pemerintah harus terus berupaya untuk mendorong kebijakan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang memadai guna memperbaiki tatanan sistem politik dan demokrasi yang lebih sehat.
- Tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 telah dimulai, agar partai politik mempersiapkan organisasi dan SDM terbaiknya guna mengikuti setiap tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan.